



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK,
DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang	: 2013-2014
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 3 Februari 2014
Pukul	: 11.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Penjelasan capaian kinerja atas program/kegiatan prioritas Tahun 2013; 2. Pembahasan dan penjelasan mengenai Kebijakan Rencana Program (KRP) prioritas dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun 2014; 3. Penjelasan mengenai progres pelaksanaan rekomendasi Panja Outsourcing BUMN DPR RI; 4. Membahas penyelenggaraan dan hasil evaluasi terhadap Konsorsium Asuransi TKI; 5. Membahas mengenai perkembangan dan solusi masalah pengangguran di Indonesia, khususnya penganggur kelompok usia muda.
Ketua Rapat	: dr. Ribka Tjiptaning/ Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI beserta jajaran. b. Komisi IX DPR RI orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dibuka pukul 12.15 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendorong Kemenakertrans RI untuk melaksanakan program/kegiatan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi RI tahun 2014 antara lain:
 - a. mempersiapkan tenaga kerja yang lebih berkesesuaian antara kebutuhan pekerjaan dan ketersediaan tenaga kerja (*link and match*);
 - b. meningkatkan pendidikan, pelatihan serta kemampuan tenaga kerja dalam rangka peningkatan produktivitas;
 - c. penghapusan praktik percaloan tenaga kerja di kalangan industri;
 - d. peningkatan perluasan lapangan kerja bagi penganggur usia muda melalui pemamfaatan secara maksimal BLK-BLK di seluruh Indonesia;
 - e. meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kemenakertrans RI untuk menjalankan rekomendasi Panja Outsourcing dengan lebih mempercepat penyelesaian kasus-kasus outsourcing yang selama ini terjadi di lingkungan perusahaan BUMN dan kasus-kasus outsourcing di lingkungan perusahaan swasta, termasuk pembubaran Perusahaan Pengerah Jasa Pekerja (PPJP) di BUMN dan Swasta yang melanggar UU.
3. Komisi IX DPR RI mendorong Kemenakertrans RI mempersiapkan pelaksanaan operasional BPJS Ketenagakerjaan melalui penyelesaian seluruh peraturan turunan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS dan pembentukan kantor BPJS Ketenagakerjaan di kawasan-kawasan industri. Komisi IX DPR RI meminta Kemenakertrans untuk menyampaikan rancangan peraturan turunan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS terkait operasional BPJS Ketenagakerjaan ke Komisi IX DPR RI, selambat-lambatnya tanggal 7 Februari 2014.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kemenakertrans untuk segera menyelesaikan masalah-masalah:
 - a. Kasus-kasus pekerja dalam negeri seperti PHK sepihak, hak-hak normatif yang tidak dibayarkan termasuk kasus pekerja BII, PT. Thiess, PT. Indofarma, PT. Kimia Farma, PT. Leces,

- RRI, PT. Kalbe Farma, PT. Lucky Print Abadi, PT. NIC Sari Roti, PT. Murakami dan lain-lain.
- b. Kasus-kasus TKI di luar negeri.
 - c. Kasus-kasus sertifikat tanah bagi transmigran.
5. Komisi IX DPR RI meminta Kemenakertrans RI untuk melaksanakan sosialisasi asuransi TKI secara optimal yang akan dianggarkan di APBN 2014.

Rapat diakhiri pukul 13.55 WIB

KETUA RAPAT,



dr. RIBKA TJIPTANING